

Volume XI, Nomor 1, April 2016

ISSN : 1978-001X



UTAMA

# TEKNIK UTAMA

JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI

**STUDI IMPLEMENTASI APLIKASI MANAJEMEN RUANG KELAS  
"NETOP SCHOOL" BERBASISKAN LOCAL AREA NETWORK (LAN)**

Napoleon Lukman

**APLIKASI AKADEMIK ONLINE BERBASIS MOBILE ANDROID PADA  
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

Sulihati dan Andriyani

**SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA PT VISION NET  
MENGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0**

Herlina Trisnawati

**PRODUKTIVITAS PEKERJA BEKISTING DAN PEMBESIAN DENGAN  
MENGUNAKAN METODE WORK SAMPLING PADA PROYEK  
GEDUNG**

Firman kresna, Bertinus Simanihuruk dan Hikma Dewita

**EVALUASI ADMINISTRASI KONTRAK  
DAN MONITORING PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI  
PADA PROYEK KONSULTAN MANAJEMEN TEKNIK PERDESAAN  
POTENSIAL**

Kumarul Aripin, Kristina Sembiring, Sempurna Bangun

**APLIKASI MONITORING DATA HIGH USAGE - FRAUD  
STUDI KASUS PADA PT INDOSAT**

Novianti Madhona Faizah

**ALAMAT REDAKSI:**

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 789096-566, Fax.(021) 7890966

Email : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

Volume XI, Nomor. 1, April 2016

ISSN : 1978-001X

# TEKNIK UTAMA

**JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Pelindung**

Rektor Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

**Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Teknik UTAMA

**DEWAN REDAKSI**

**Ketua Dewan Redaksi**

Ketua LPPM UTAMA

**Wakil Ketua Dewan Redaksi**

Wakil Ketua LPPM UTAMA

**Anggota Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Ir. Bambang Soenarto, Dipl.H.E.,En.Dipl.GR., M. Eng.(Dosen UTAMA)

Prof. Dr. Ir. Sjahdanul Irwan, M.Sc. (Dosen UTAMA)

Dr. Maspul Aini Kambry , M.Sc. (Dosen UTAMA)

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Ir. Sri Murni Dewi, MS.(Univ. Brawijaya)

Prof. Dr. Ir. H. Dahmir Dahlan M.Sc.(ISTN)

Ir. H. Media Nofri, M.Sc. (Dosen ISTN)

**Redaksi Pelaksana**

H. Hamidullah Mahmud, Lc., MA

Ir. Bertinus Simanihuruk, MT

Ir. Made Sudiarta, MT

Djoko Prihartono, ST., MT

Lukman Hakim, ST., M.Sc.

Napoleon Lukman, ST

---

**Penerbit**

Universitas Tama Jagakarsa

**Alamat Redaksi**

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021)7890965-66. Fax.(021) 7890966, E-mail : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



# TEKNIK UTAMA

UTAMA

JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI

---

---

<b>STUDI IMPLEMENTASI APLIKASI MANAJEMEN RUANG KELAS "NETOP SCHOOL" BERBASIS <i>LOCAL AREA NETWORK</i> (LAN)</b> Napoleon Lukman .....	1 - 14
<b>APLIKASI AKADEMIK ONLINE BERBASIS MOBILE ANDROID PADA UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA</b> Sulihati dan Andriyani.....	15 - 26
<b>SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA PT VISION NET MENGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0</b> Herlina Trisnawati .....	27 - 32
<b>PRODUKTIVITAS PEKERJA BEKISTING DAN PEMBESIAN DENGAN MENGUNAKAN METODE WORK SAMPLING PADA PROYEK GEDUNG</b> Firman kresna, Bertinus Simanihuruk dan Hikma Dewita.....	33 - 44
<b>EVALUASI ADMINISTRASI KONTRAK DAN MONITORING PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI PADA PROYEK KONSULTAN MANAJEMEN TEKNIK PERDESAAN POTENSIAL</b> Kumarul Aripin, Kristina Sembiring, Sempurna Bangun .....	45 - 56
<b>APLIKASI MONITORING DATA HIGH USAGE - FRAUD STUDI KASUS PADA PT INDOSAT</b> Novianti Madhona Faizah .....	57 - 66

**ALAMAT REDAKSI:**

LPPM Universitas Tama Jagakarsa  
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530  
Telp.(021) 7890965-66  
Fx.(021) 7890966, Email : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)  
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

**EVALUASI ADMINISTRASI KONTRAK  
DAN MONITORING PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI  
PADA PROYEK KONSULTAN MANAJEMEN TEKNIK PERDESAAN  
POTENSIAL**

Oleh;  
Kumarul Aripin, Kristina Sembiring, Sempurna Bangun

**ABSTRAK**

Dalam suatu proyek konstruksi terdapat 2 (dua) kegiatan penting yang harus berjalan paralel, mulai dari saat kontrak ditandatangani sampai kontrak tersebut berakhir yaitu kegiatan fisik dan administrasi kontrak. Administrasi kontrak diperlukan dalam setiap pelaksanaan kontrak. Pentingnya Administrasi kontrak bertujuan untuk memastikan bahwasanya pihak-pihak yang terkait dalam kontrak tersebut dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian Evaluasi Administrasi Kontrak dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Pada Proyek Konsultan Manajemen Teknik Pedesaan Potensial, ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu menentukan kerangka pemikiran, hipotesa, langkah dalam melakukan metodologi penelitian, dan data-data yang sedang dikerjakan oleh kontraktor. Konsultan Manajemen Teknik (KMT) dalam pelaksanaannya memantau dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara administrasi, fisik dan keuangan pada 16 provinsi di 40 kota/kabupaten dengan 110 paket kegiatan hingga selesai pelaksanaan kegiatan selama 8 (delapan) bulan dari awal Mei 2013 dan telah berakhir sampai dengan 25 Desember 2013. Dari hasil memonitor kelengkapan dokumen administrasi dari seluruh Satker Provinsi di 16 Provinsi dan 40 Kabupaten Kota untuk 110 paket kegiatan sampai dengan 25 Desember 2013 ini KMT untuk kegiatan lelang dan tender kontraktor berjalan dengan baik. Begitupun dengan monitoring keuangan, semua anggaran dapat terserap untuk setiap paketnya. Namun, tidak demikian dengan progress fisik yang mengalami kendala dilapangan. Sampai akhir kegiatan KMT, progress keseluruhan adalah 95,94% yang artinya mengalami deviasi -4,05.

Kata Kunci : Evaluasi, administrasi kontrak, infrastruktur pedesaan, pedesaan potensial, monitoring

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Rangkaian kegiatan proyek konstruksi merupakan suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan. Proses dalam rangkaian kegiatan proyek konstruksi melibatkan pihak-pihak yang terkait baik

secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik proyek konstruksi dapat dipandang dalam 3 (tiga) dimensi yaitu unik, melibatkan sejumlah sumber daya, dan membutuhkan organisasi. Dalam suatu proyek konstruksi terdapat 2 (dua) kegiatan penting yang harus berjalan paralel, mulai dari saat kontrak ditandatangani sampai

kontrak tersebut berakhir. Kegiatan pertama adalah kegiatan fisik proyek berupa pelaksanaan konstruksi dilapangan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Kegiatan penting kedua adalah kegiatan non fisik yang merupakan penunjang dari kegiatan fisik yaitu apa yang dikenal dengan istilah administrasi proyek konstruksi (*construction project administration*).

Pada saat ini, pembangunan nasional dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, terutama terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan. Selama ini pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Untuk itu Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menjalankan arah kebijakan pembangunan nasional yaitu dengan melaksanakan program-program berbasis pemberdayaan sebagai penunjang dalam memicu pembangunan infrastruktur di pedesaan. Dengan adanya kegiatan tersebut maka diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk mendukung persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan yang lebih optimal sehingga mampu memberikan efek terhadap ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat guna [PU 2012]. Dengan melihat pentingnya kontrak dan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan maka peneliti tertarik untuk mengkaji Evaluasi Administrasi Kontrak dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Pada Proyek Konsultan Manajemen Teknik Perdesaan Potensial.

## **B. Rumusan Masalah**

Secara umum yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan administrasi konstruksi adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi kontrak dari kontrak tersebut. Suatu

kontrak konstruksi seharusnya diawali dengan suatu perencanaan yang matang, kemudian dilanjutkan dengan proses pembentukan/ penyusunan dan diteruskan dengan pelaksanaan kontrak tersebut. Selanjutnya kontrak ini harus diadministrasikan dan dikelola. Proyek pembangunan infrastruktur pedesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Hal-hal yang harus menjadi perhatian di masa mendatang untuk proyek pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan. [Asnudin, 2009]. Dengan adanya rendahnya tingkat keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur pedesaan maka peneliti tertarik untuk mengkaji Evaluasi Administrasi Kontrak dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Pada Proyek Konsultan Manajemen Teknik Perdesaan Potensial.

## **C. Batasan Masalah**

Dengan adanya keterbatasan waktu maka dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian Evaluasi Administrasi Kontrak dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Pada Proyek Konsultan Manajemen Teknik Perdesaan Potensial adalah

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Potensial yang dikaji di 16 (enam belas) Provinsi.
2. Kegiatan yang dikaji adalah memantau dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik secara administrasi maupun managerial.

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian Evaluasi Administrasi Kontrak

dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Pada Proyek Konsultan Manajemen Teknik Perdesaan Potensial adalah :

1. Untuk menganalisa hasil monitoring progress administrasi, kegiatan lelang, dan tender Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Potensial di 16 (enam belas) Provinsi
2. Untuk menganalisa hasil monitoring progress fisik Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Potensial di 16 (enam belas) Provinsi.
3. Untuk menganalisa hasil monitoring progress keuangan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Potensial di 16 (enam belas) Provinsi.

## **II. Studi Pustaka**

### **A. Proyek Konstruksi**

Proyek konstruksi merupakan upaya pembangunan yang tidak sematamata pada pelaksanaan pembangunan fisiknya saja, akan tetapi, mencakup arti sistem pembangunan secara utuh dan lengkap. Penyelenggaraan proyek konstruksi adalah merubah gambar perencanaan rekayasa struktur maupun arsitektural berikut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan atau spesifikasi teknis yang diwujudkan menjadi bangunan fisik dan dilaksanakan dengan biaya dan jangka waktu tertentu.

### **B. Pelelangan**

Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak

yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik.

### **B.1 Macam Pelelangan**

Proses pengadaan barang/jasa dalam proyek konstruksi yang menggunakan pelelangan dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Dalam pelelangan umum semua penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat ikut dalam pelelangan, sedangkan daam pelelangan terbatas, yang diizinkan ikut adalah penyedia barang/jasa yang di undang oleh pengguna jasa.

### **B.2 Sumber Hukum Pelelangan**

Keppres yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, contohnya keppres No.14.A tahun 1980 tanggal 14 april 1981, tahun anggaran 1984/1985 telah di eluarkan keppres No.29. Tahun 1980 dan keppres No.18 Tahun 1981. Kemudian di sempurnakannya keppres No.16 tahun 1994 di lanjutkan Keppres No.80 tahun 2003. Yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/ jasa secara elektronik.

### **B.3 Tata Cara Pelelangan**

#### **a. Syarat Peserta Lelang**

Penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti pelelangan adalah mereka yang telah memenuhi kualifikasi klasifikasi dan memiliki kemampuan sumber daya sesuai dokumen prakualifikasi dan syarat–syarat sebagai mana yang telah di tetapkan.

- b. Pengumuman Dan Pendaftaran Peserta
- c. Prakualifikasi

- d. Penyusunan daftar calon peserta lelang, penyampaian undangan, dan pengambilan dokumen lelang
- e. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
- f. Penyampaian Dan Pembukaan Dokumen Penawaran
- g. Evaluasi Penawaran
- h. Pembuatan Berita Acara Pelelangan
- i. Penetapan pemenang lelang
- j. Pengumuman Pemenang Lelang
- k. Sanggahan peserta lelang
- l. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa

### C. Kontrak

Kontrak proyek konstruksi ini berupa dokumen tertulis dan wajib menjelaskan tentang kesepakatan keselamatan umum dan tertib bangunan karena sebuah proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi. Jenis-jenis kontrak proyek konstruksi adalah kontrak harga satuan (*unit price contract*, kontrak biaya plus jasa (*cost plus fee contract*), kontrak biaya menyeluruh (*lump sum contract*).

#### C.1. Aspek Hukum Kontrak Konstruksi

Sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwasanya seluruh perjanjian yang dibuat secara syah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga suatu dokumen kontrak sesungguhnya adalah hukum.

#### C.2 Kekuatan Hukum Dokumen Dalam Kontrak Konstruksi

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, kadang kita menemui kesulitan untuk melaksanakan perintah karena perintahnya berbeda dengan isi dokumen kontrak. Kesulitan lainnya yang sering

terjadi adalah perbedaan isi dokumen yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu prinsip dari kekuatan atau prioritas untuk diikuti dan dilaksanakan adalah Dokumen yang terbit lebih akhir adalah yang lebih kuat/mengikat untuk dilaksanakan.

### D. Administrasi Kontrak

Administrasi Kontrak merupakan upaya pengelolaan atas kontrak dalam periode pelaksanaannya sehingga kewajiban dan hak dari masing-masing pihak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak tersebut.

### E. Sengketa Dalam Kontrak Konstruksi

Suatu dokumen kontrak konstruksi harus benar-benar dicermati dan ditangani secara benar dan hati-hati karena mengandung aspek hukum yang akan mempengaruhi dan menentukan baik buruknya pelaksanaan kontrak. Pentingnya Administrasi kontrak bertujuan untuk memastikan bahwasanya Pihak-pihak yang terkait dalam kontrak tersebut dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

### F. Infrastruktur Pedesaan

Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A,2005). Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain (Pedoman PPIP, 2006):

- a. Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan

b. Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan.

Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan

### **G. Dimensi Perdesaan Potensial**

Berangkat dari UU No. 26 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa kawasan perdesaan mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

## **III. DATA DAN BAHAN PENELITIAN**

### **A. Metodologi Penelitian**

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian Evaluasi Administrasi Kontrak dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Pada Proyek Konsultan Manajemen Teknik Perdesaan Potensial, ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu menentukan kerangka pemikiran, hipotesa, langkah dalam melakukan metodologi penelitian, dan data-data yang sedang dikerjakan oleh kontraktor.

#### **A.1 Kerangka Pemikiran**

Penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai sasaran, maka peranan dari pengawasan dan pengendalian merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tepat waktu, mutu, efisien biaya dan tertib administrasi. Mengingat jumlah paket pekerjaan fisik pada Pemberi Kerja tersebut cukup banyak dan menyebar di kota/ kabupaten di beberapa Provinsi,

maka dibutuhkan strategi pengendalian manajemen agar terpantau dan terjadwal, oleh sebab itu diperlukan kegiatan Jasa Konsultan *Manajemen Teknik* dalam rangka membantu sebagian tugas Pemberi Kerja dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik secara administrasi maupun managerial sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran seperti yang direncanakan.

#### **A.2 Hipotesa**

Dengan melakukan analisis data - data pekerjaan subkontrak pekerjaan granit maka pelaksanaan proyek yang telah dilakukan oleh subkontraktor pada 29 pekerjaan granit dapat dikendalikan dari segi waktu dan biaya pelaksanaan.

#### **A.3 Tahapan Dalam Metodologi Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu kajian literatur, data-data kinerja subkontraktor pekerjaan granit dengan kajian literatur serta menarik kesimpulan dan saran

#### **A.4 Studi Pustaka**

Studi Pustaka yang dilakukan mengenai teori tentang proyek konstruksi, pelelangan, kontrak, administrasi kontrak, sengketa dalam kontrak konstruksi dan infrastruktur pedesaan.

### **B. Pengumpulan Data Pemantauan Progres Pembangunan Infrastruktur Di Lapangan**

#### **B1 Data Monitoring Progres Administrasi, Fisik dan Keuangan**

Konsultan Manajemen Teknik (KMT) dalam pelaksanaannya memantau dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara administrasi, Fisik dan keuangan pada 16 Provinsi di 40 Kota/Kabupaten dengan 110 paket kegiatan hingga selesai



pelaksanaan kegiatan selama 8 (delapan) bulan dari awal Mei 2013 dan telah berakhir sampai dengan 25 Desember 2013.

#### **B.1.1 Monitoring Progres Administrasi Kegiatan Lelang dan Tender**

Pekerjaan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) diantaranya adalah memonitor kelengkapan dokumen administrasi dari seluruh Satker Provinsi di 16 Provinsi dan 40 Kabupaten Kota untuk 110 paket kegiatan. Sampai dengan 25 Desember 2013 ini KMT telah mengumpulkan beberapa data mengenai kelengkapan dokumen Satker Provinsi.

##### **B.1.1.1 Progres Kegiatan Lelang dan Tender Kontraktor**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 oleh beberapa Satker Provinsi semua paket kegiatan telah terkontrak sejumlah 110 paket kegiatan (100 %).

##### **B.1.1.2 Progres Kegiatan Lelang dan Tender Konsultan Supervisi**

Sampai dengan 25 Desember 2013, total kegiatan Supervisi adalah 56 paket kegiatan. Konsultan supervisi yang telah terkontrak sebanyak 56 paket kegiatan (100%).

##### **B.1.2 Data Monitoring Progres Keuangan**

Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Provinsi telah terserap sebesar 100% sampai dengan 25 Desember 2013.

##### **B.1.3 Data Monitoring Progres Fisik**

Prosentase pelaksanaan progress fisik keseluruhan kegiatan KMT per 25 Desember 2013 baru mencapai 95,94% atau mengalami deviasi -4, 06 dari yang seharusnya sudah 100%.

#### **IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Monitoring Progres Administrasi, Kegiatan Lelang dan Tender**

Dari hasil memonitor kelengkapan dokumen administrasi dari seluruh Satker Provinsi di 16 Provinsi dan 40 Kabupaten Kota untuk 110 paket kegiatan sampai dengan 25 Desember 2013 ini KMT untuk kegiatan lelang dan tender kontraktor berjalan dengan baik dimana 100 paket selesai pekelangnya. Hal sama juga terjadi progress lelang dan tender konsultan supervisi yang berjalan dengan baik.

#### **B. Analisis Monitoring Progres Keuangan**

Dari progres keuangan yang terserap di pembangunan infrastruktur pedesaan potensial di 16 propinsi dapat terserap oleh kontraktor sampai tanggal 25 Desember 2013.

#### **C. Analisis Monitoring Progres Fisik Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Potensial**

Dari hasil memonitor kelengkapan dokumen administrasi dari seluruh Satker Provinsi di 16 Provinsi dan 40 Kabupaten Kota untuk 110 paket kegiatan sampai dengan 25 Desember 2013 ini KMT untuk kegiatan lelang dan tender kontraktor berjalan dengan baik seperti yang terlihat pada tabel 3.2 dimana 100 paket selesai pekelangnya. Hal sama juga terjadi progress lelang dan tender konsultan supervisi yang berjalan dengan baik. Pada Master Schedule (Kurva S) kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Pedesaan Potensial yang sudah berjalan, terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi progres kegiatan fisik yang telah berjalan di 16 Provinsi termasuk dengan kegiatan KMT sampai tanggal 25 Desember 2013 adalah sebesar

95,94% dari rencana 100 %, dengan deviasi -4,06% Progres fisik khusus untuk paket kegiatan infrastruktur saja yang dapat dihimpun oleh KMT dari hasil laporan konsultan supervisi di 16 provinsi

dapat dilihat pada **Tabel 4.1 dan Tabel 4.2**, dengan rata-rata realisasi fisik 95,94% dari rencana 100% dengan deviasi -4,06%.

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Progres Fisik Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Potensial 25 Desember 2013**

NO	PROVINSI	RENCANA FISIK	REALISASI FISIK	DEVIASI	LAPORAN
		(%)	(%)	(%)	
1	NAD	100	40,5	-59,53	
2	SUMATERA UTARA	100	100	-	MKSP
3	SUMATERA BARAT	100	97,55	-1,27	MKSP
4	SUMATRA SELATAN	100	100	-	MKSP
5	BANTEN	100	100	-	MKSP
6	JAWA BARAT	100	100	-	
7	DKI JAKARTA	100	100	-	
8	JAWA TENGAH	100	100	-	
9	JAWA TIMUR	100	95,89	-4,11	
10	BALI	100	100	-	
11	NTT	100	100	-	
12	SULAWESI SELATAN	100	100	-	
13	SULAWESI BARAT	100	100	-	
14	SULAWESI UTARA	100	100	-	
15	D.I.YOGYAKARTA	100	100	-	MKSP
16	MALUKU UTARA	100	100	-	
	<b>RATA-RATA</b>	<b>100</b>	<b>95,94</b>	<b>-4,06</b>	

Keterangan:

MKS: Laporan yang masuk dari Konsultan Supervisi

Sumber : Laporan Akhir KMT Perdesaan Potensial 2013

**Tabel 4.2 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan Potensial yang Telah Selesai 25 Desember 2013**

No	Provinsi	Paket Pekerjaan		Total
		Belum Selesai	Telah Selesai 100 %	
1	Nanggroe Aceh Darusalam	1	-	1
2	Sumatera Utara	-	1	1
3	Sumatera Barat	4	7	11
4	Sumatera Selatan	-	2	2
5	Banten	-	3	3
6	DKI Jakarta	-	1	1
7	Jawa Barat	-	3	3
8	Jawa Tengah	-	4	4
9	D.I. Yogyakarta	-	1	11
10	Jawa Timur	1	-	1
11	Bali	-	1	1
12	Nusa Tenggara Timur	-	1	1
13	Sulawesi Selatan	-	1	1
14	Sulawesi Barat	-	2	2
15	Sulawesi Utara	-	6	65
16	Maluku Utara	-	2	2
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>110</b>

Sumber : Laporan Akhir KMT Perdesaan Potensial 2013

**Tabel 4.3 Paket Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Potensial dengan Deviasi diatas -5% sampai dengan 25 Desember 2013**

No.	PROVINSI	KABUPATEN	KEGIATAN	DEVIASI (%)
1	NAD	Kab. Aceh Tenggara	Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Lawe Bulan	-44,84
2	JAWA TIMUR	Kab. Gresik	Peningkatan Jalan Produksi Kawasan Minapolitan Sidayu	-4,11
3	SUMBAR	Kab. Padang Pariaman	Peningkatan Jalan Usaha Tani di Kawasan Agropolitan Lubuk Alung	-2
			Peningkatan Jalan Usaha Tani di Kawasan Agropolitan Patamuan	-5
		Kab. Agam	Penyediaan Jalan Usaha Tani di Kawasan Agropolitan Sungai Puar	-5
			Penyediaan Jalan Usaha Tani di Kawasan Agropolitan Tani IV	-2

Sumber : Laporan Akhir KMT Perdesaan Potensial 2013

Penjelasan :

- a) Paket kegiatan yang terlihat paling tinggi deviasinya adalah paket kegiatan di Provinsi NAD memiliki deviasi -44,84. Keterlambatan terjadi karena kendala curah hujan yang cukup tinggi di lokasi sehingga pekerjaan menjadi tertunda.
  - Antisipasi dari permasalahan tersebut, PPK telah melakukan koordinasi dengan kontraktor dan diharapkan dapat memaksimalkan cuaca cerah untuk melaksanakan pekerjaan berbutir dan pekerjaan terstruktur, dan melakukan percepatan pekerjaan pada item pekerjaan pengaspalan.
- b) Paket kegiatan di Gresik memiliki deviasi -4,11% disebabkan selain masalah pembebasan lahan yang baru saja selesai, juga dikarenakan akses jalan masuk ke lokasi hanya satu

sehingga pasokan material dan menjadi terkendala.

- Keterlambatan di kabupaten Gresik ini optimis akan segera selesai di akhir Desember 2013 dengan percepatan pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor di lapangan.
- c) Kegiatan di Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam memiliki deviasi -2% s.d -5%, penyebab keterlambatan tidak jelas.
  - Empat kegiatan pada dua kabupaten di Sumatera Barat sampai dengan minggu ini mengalami keterlambatan, tetapi optimis akan segera selesai di akhir Desember 2013 ini.

## **D. Evaluasi Progres Administrasi, Fisik dan Keuangan**

### **D.1. Evaluasi Progres Administrasi Dokumen & Kegiatan Lelang dan Tender**

#### **D.1.1. Progres Administrasi Dokumen**

Progres administrasi dokumen pembangunan infrastruktur pedesaan potensial sampai tanggal 25 Desember 2013 ada beberapa Provinsi yang belum memasukan dokumen kelengkapan administrasinya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Konsultan Manajemen Teknik dalam mengumpulkan dokumen tersebut dikarenakan ketidaktahuan Konsultan Supervisi dan Kontraktor di daerah tentang fungsi dan peran Konsultan Manajemen Teknik. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari Satker Pusat tentang peran fungsi Konsultan Manajemen Teknik tersebut membuat Konsultan Supervisi dan Kontraktor sungkan dalam memberikan dokumen yang diminta tersebut.

#### **D.1.2 Progres Lelang & Tender**

Sampai dengan 25 Desember 2013 ini semua paket kegiatan kontrak telah dilakukan yaitu 110 paket kegiatan. Paket kegiatan supervisi seluruhnya telah terkontrak yaitu sebanyak 56 paket kegiatan. Progres kegiatan kontrak untuk kegiatan kontrak supervisi dengan kontrak pekerjaan konstruksi/kontraktor sudah 100% dari total keseluruhan kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan pedesaan potensial.

### **D.2. Evaluasi Progres Fisik**

Realisasi progres kegiatan infrastruktur sampai dengan 25 Desember 2013 seharusnya secara keseluruhan telah selesai 100%, tetapi saat ini realisasi fisik masih sebesar 95,94% dari rencana 100%, tetapi optimis seluruh kegiatan dapat selesai sebelum akhir Desember 2013. Untuk Kegiatan yang telah selesai 100% Konsultan Manajemen Teknik melalui Konsultan Supervisi memberikan saran agar segera melakukan serah terima (PHO) kepada Satker Daerah selaku pemberi kerja. Dan sebaliknya untuk kegiatan yang mengalami deviasi yaitu kegiatan yang di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Jawa Timur, Konsultan Manajemen Teknik mendesak Konsultan Supervisi untuk segera menyelesaikan kegiatanyang dikerjakan kontraktor dan pendampingan secara intensif demi tercapainya proyek yang tertib administrasi, biaya , waktu dan mutu.

### **D.3. Evaluasi Progres Keuangan**

Penyerapan keuangan sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 sudah mencapai 100% untuk keseluruhan paket kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan potensial pada 16 Provinsi. Penyerapan keuangan pada bulan Oktober 2013 mengalami penurunan dikarenakan ada tambahan kegiatan SKPA 2 di 7 provinsi yang baru berjalan sehingga secara tidak langsung mempengaruhi progres keuangan yang menjadi sedikit menurun di bulan tersebut. Tetapi penyerapan keuangan secara keseluruhan berjalan cukup baik.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Konsultan Manajemen Teknik (KMT) dalam pelaksanaannya memantau dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara administrasi, fisik dan keuangan pada 16 Provinsi di 40 Kota/Kabupaten dengan 110 paket kegiatan hingga selesai pelaksanaan kegiatan selama 8 (delapan) bulan dari awal Mei 2013 dan telah berakhir sampai dengan 25 Desember 2013. Dari hasil memonitor kelengkapan dokumen administrasi dari seluruh Satker Provinsi di 16 Provinsi dan 40 Kabupaten Kota untuk 110 paket kegiatan sampai dengan 25 Desember 2013 ini KMT untuk kegiatan lelang dan tender kontraktor berjalan dengan baik. Begitupun dengan monitoring keuangan, semua anggaran dapat terserap untuk setiap paketnya. Namun, tidak demikian dengan progress fisik. Progress fisik pelaksanaan kegiatan mengalami kendala dilapangan. Sampai akhir kegiatan KMT, progress keseluruhan adalah 95,94% yang artinya mengalami deviasi -4,05. Dari penelitian mengenai Evaluasi Administrasi Kontrak dan Monitoring Pelaksanaan Proyek Pada Proyek Konsultan Manajemen Teknik Perdesaan Potensial didapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dari proses lelang pada proyek pembangunan infrastrukru pedesaan yang potensial ada beberapa Provinsi yang belum memasukan dokumen kelengkapan administrasinya.
2. Dalam melaksanakan monitoring serta evaluasi konsultan mengalami kesulitan dalam mendapatkan data – data dari daerah.

### B. Saran

1. Mengingat beberapa kendala dilapangan saat mengumpulkan dokumen pendukung kegiatan SKPA oleh KMT maupun Satker Pemberi, diusulkan agar ada aturan yang jelas dan mengikat dari Satker Pemberi kepada Satker Penerima mengenai pendokumentasian paket kegiatan SKPA.
2. Dikarenakan paket pekerjaan pada beberapa daerah yang mengalami keterlambatan oleh karena cuaca yang tidak mendukung ( hujan, banjir, dsb-nya) maka konsultan supervisi dan kontraktor perlu menyiasati dan mengantisipasi waktu pelaksanaan pekerjaan sejak awal perencanaan, yaitu dengan memperhitungkan kemungkinan waktu musim penghujan yang akan terjadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asnudin Andi, 2005, "Manajemen Proyek Konstruksi", UNTAD Press-Palu.
- Ervianto Wulfram E., Manajemen Proyek Konstruksi, Penerbit Andi, Yogyakarta 2005
- Asnudin Andi (2009), Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat, Jurnal SMARTek, Vol.7, No.4 Nopember 2009 : 292-300.
- Yasin Nazarkhan (2003), Administrasi Proyek Konstruksi : Pengenalan, Cara Mengelola, Bentuk Organisasi, Kegiatan dan Peran Konsultan Hukum, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gilbreath Robert D., (1992) Managing Construction Contracts : Operational Controls for Commercial Risk 3, Second Edition, John Wiley & Son Inc, USA

